



## Implementasi Kebijakan pada Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Ardan Syukur Fadhillah Universitas Muhammadiyah Jakarta <a href="mailto:ardansyukurfadhillah@gmail.com">ardansyukurfadhillah@gmail.com</a> +6281295918460</p> <p>Izzatusholekha Universitas Muhammadiyah Jakarta <a href="mailto:izzatusholekha@umj.ac.id">izzatusholekha@umj.ac.id</a> +6287774888091</p>	<p>ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp</a></p>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi**

Fadhillah, A. S., & Izzatusolekha. (2026). Implementasi Kebijakan pada Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 779-790.

### **Abstrak**

Program Satu Miliar Satu Desa atau SAMISADE merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur desa melalui bantuan keuangan sebesar satu miliar rupiah per desa setiap tahun. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan variasi tingkat implementasi antar desa seperti: ketimpangan hasil antar desa, keterbukaan informasi publik terkait program SAMISADE masih rendah, rendahnya kapasitas aparatur desa, pengawasan dari pemerintah daerah dan kecamatan belum optimal, serta terbatasnya partisipasi masyarakat. sehingga menimbulkan perbedaan capaian hasil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program SAMISADE berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi variasi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, aparatur kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat pada tiga desa di Kabupaten Bogor yang merepresentasikan variasi implementasi. Analisis dilakukan menggunakan indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tingkat implementasi dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, efektivitas komunikasi antar aktor, kualitas pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Desa Sasak Panjang dan Desa Cibentang berada pada kluster optimal, Desa Cogreg berada pada kluster belum optimal, dan tidak terdapat desa yang masuk dalam kluster sangat optimal. Kendala utama meliputi perbedaan pemahaman kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program ditentukan oleh konsistensi pemenuhan indikator kebijakan serta penguatan koordinasi dan pengawasan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Program SAMISADE, Pembangunan Infrastruktur Desa, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023, Kabupaten Bogor

### Abstract

The One Billion One Village Program, known as SAMISADE, is a policy of the Bogor Regency Government aimed at accelerating rural infrastructure development through financial assistance of one billion rupiah per village each year. In its implementation, variations remain among villages, including disparities in development outcomes, limited public transparency, low capacity of village officials, suboptimal supervision from regional and sub-district governments, and limited community participation, which lead to differences in policy results. This study aims to analyze the implementation of the SAMISADE Program based on Regent Regulation of Bogor Number 54 of 2023 and to identify factors influencing variations in its implementation. The research uses a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation involving the Department of Community and Village Empowerment, sub-district officials, village governments, Village Consultative Bodies, and community members in three villages representing different levels of implementation. The analysis applies the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, covering policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, interorganizational communication, implementers' disposition, and social, economic, and political conditions. The results indicate that differences in implementation are influenced by human resource capacity, communication effectiveness, supervision quality, and community participation. Sasak Panjang and Cibentang Villages are categorized as optimal, Cogreg Village as not yet optimal, and no village meets the criteria of very optimal. The study concludes that successful implementation depends on consistent fulfillment of policy indicators and strengthened coordination and supervision.

**Key Words:** Policy Implementation, SAMISADE Program, Village Infrastructure Development, Regent Regulation No. 54 of 2023, Bogor Regency.

### A. Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan. Penguatan desa ditegaskan melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri serta memperoleh dukungan pendanaan dari APBN dan APBD (Hadi, 2025).

Kebijakan tersebut diperkuat dengan pengaturan Dana Desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 serta dukungan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam kebijakan transfer ke daerah. Skema pendanaan ini bertujuan mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa (Lestari et al., 2022). Di tingkat provinsi, bantuan keuangan desa juga diatur melalui regulasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung percepatan pembangunan desa secara terintegrasi (Agustina et al., 2022).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Program Satu Miliar Satu Desa atau SAMISADE sebagai instrumen percepatan pembangunan infrastruktur desa. Program ini memberikan alokasi hingga 1 miliar rupiah per desa per tahun yang bersumber dari APBD kabupaten dan difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan sarana pendukung ekonomi masyarakat (Michel et al., 2024). Pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023 sebagai dasar hukum utama program.

Data pelaksanaan Program SAMISADE periode 2021 sampai 2024 menunjukkan realisasi 376 kegiatan dengan total anggaran Rp111.597.823.823. Pembangunan drainase dan jembatan mendominasi baik dari sisi jumlah kegiatan maupun anggaran, yang menunjukkan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas desa (Kalila, 2024). Selain itu, alokasi anggaran meningkat dari Rp372 miliar pada awal pelaksanaan menjadi Rp407 miliar pada tahun 2023 atau sekitar 97,8 persen dari kebutuhan Rp416 miliar (Agus Sopyan, 2025). Data ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan desa.

Namun pelaksanaan program belum sepenuhnya merata. Pada awal implementasi masih terdapat desa yang belum mengajukan pendanaan akibat keterbatasan administrasi dan pemahaman aparat desa terhadap mekanisme program, selain itu, transparansi masih rendah. Informasi perencanaan, penggunaan anggaran, progres fisik, dan evaluasi belum terbuka secara

konsisten. Pemanfaatan sistem e SAMISADE juga belum optimal sehingga publik belum dapat memantau data secara langsung (Michel et al., 2024). Masalah teknis dan pengawasan masih ditemukan, terdapat pula enam desa yang tidak menerima pencairan dana akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan, serta temuan keterlambatan pekerjaan dan kualitas pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi teknis (Irfani et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi masih rendah. Musyawarah desa belum berjalan optimal sehingga pengawasan publik lemah (Sally dan Edy, 2025).

Ketimpangan pembangunan antar desa juga terjadi. Desa dengan kapasitas administratif dan dukungan aktor yang kuat mampu melaksanakan program lebih baik dibanding desa dengan kapasitas terbatas (Purwawangsa et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas belum otomatis menghasilkan implementasi yang seragam.

Berbagai masalah dalam implementasi Program SAMISADE, seperti rendahnya transparansi, ketimpangan antar desa, lemahnya pengawasan, perbedaan pemahaman aktor, dan minimnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak seragam di setiap desa. Kondisi ini mendorong perlunya pengelompokan desa berdasarkan tingkat implementasi agar variasi permasalahan dapat dianalisis secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan klusterisasi yang membagi desa ke dalam tiga kategori, yaitu sangat optimal, optimal, dan belum optimal. Kategori tersebut merupakan klasifikasi analitis yang disusun peneliti untuk memetakan variasi implementasi kebijakan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor. Rincian klusterisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Klusterisasi Desa Berdasarkan Implementasi Kebijakan Program SAMISADE 2023-2025

Klaster	Karakteristik	Alasan dan Contoh Indikator
Sangat Optimal	Desa yang kuat antara standar kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan dukungan lingkungan. Implementasi Program SAMISADE pada klaster ini telah mencapai tujuan kebijakan secara optimal dan stabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi kebijakan berjalan sangat efektif.</li> <li>• Penyerapan anggaran SAMISADE sangat tinggi.</li> <li>• Pembangunan fisik selesai tepat waktu dan berkualitas.</li> <li>• Administrasi dan laporan pertanggungjawaban tertib dan tepat waktu.</li> <li>• Koordinasi antar pelaksana berjalan sangat baik.</li> <li>• Partisipasi masyarakat tinggi dan berkelanjutan.</li> </ul>
Optimal	Desa yang telah mampu mengimplementasikan kebijakan dengan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek administrasi, konsistensi pelaporan, dan optimalisasi koordinasi antaraktor pelaksana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program SAMISADE telah dilaksanakan dengan baik.</li> <li>• Penyerapan anggaran tinggi, namun belum sepenuhnya maksimal.</li> <li>• Pembangunan fisik sebagian besar selesai.</li> <li>• Administrasi relatif tertib, meskipun masih ditemukan keterlambatan minor.</li> <li>• Koordinasi dan pengawasan berjalan, tetapi belum sepenuhnya konsisten.</li> </ul>
Belum Optimal	Desa yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SAMISADE masih berada pada tahap transisi. Kebijakan telah dijalankan, namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan kapastitas, tata Kelola, dan komunikasi kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program SAMISADE telah berjalan, namun belum optimal.</li> <li>• Penyerapan anggaran masih terbatas atau bertahap.</li> <li>• Pembangunan fisik belum sepenuhnya selesai.</li> <li>• Terdapat kendala administratif dan teknis.</li> <li>• Kapasitas aparatur desa masih perlu ditingkatkan.</li> <li>• Membutuhkan pendampingan dan pengawasan lebih intensif.</li> </ul>

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Tabel tersebut menjadi acuan untuk menilai tingkat implementasi kebijakan Program SAMISADE di desa. Penilaian menggunakan indikator seperti penyerapan anggaran, ketepatan waktu pembangunan, kualitas fisik, ketertiban administrasi, koordinasi pelaksana, dan partisipasi masyarakat.

Desa yang memenuhi sebagian besar indikator tinggi dikategorikan sangat optimal. Desa dengan capaian menengah masuk kategori optimal. Desa dengan banyak keterbatasan masuk kategori belum optimal. Proses ini dilakukan secara sistematis agar variasi implementasi dapat terlihat secara objektif.

Berbagai persoalan teknis, pengawasan, perbedaan pemahaman aktor, dan rendahnya partisipasi menunjukkan implementasi belum merata di Kabupaten Bogor. Sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023, program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini mengkaji konsistensi implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui studi Implementasi Kebijakan Program Satu Miliar Satu Desa di Kabupaten Bogor. Analisis ini penting untuk memahami variasi pelaksanaan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan penguatan kebijakan pembangunan infrastruktur desa secara lebih tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) Di Kabupaten Bogor?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) Di Kabupaten Bogor.

### **Pengertian Kebijakan**

Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku aktor dalam suatu bidang tertentu (Sawir, 2021). Dye (2013:3) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Andhika, 2019). Frederick sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:7), menekankan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks lingkungan tertentu (Dewi, 2019). Jones mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku yang konsisten dan berulang yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan proses serta kebutuhan penyelesaian masalah (Zainal, 2023).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang secara sadar untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan mencerminkan pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak, dijalankan secara konsisten, serta diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam merespons kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

### **Pengertian Implementasi**

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Pressman dan Wildavsky (1973) menjelaskan bahwa implementasi adalah proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan (Munawarah dan Wahyu, 2023). Mazmanian dan Sabatier (1983) memandang implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan yang telah dirumuskan sebelumnya (Ramadan, 2023). Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan berkembang dalam tiga generasi. Generasi pertama melihat implementasi sebagai persoalan antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Generasi kedua menekankan pendekatan top down dengan fokus pada peran birokrasi. Generasi ketiga menyoroti pentingnya perilaku aktor pelaksana sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi (Jumria Mansur, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh peran birokrasi dan perilaku aktor pelaksana. Perkembangan studi implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh keterkaitan antara perumusan kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta kapasitas dan sikap pelaksana di lapangan.

### **Pengertian Pembangunan Desa**

Pembangunan desa dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur sosial, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan ketimpangan (Meyer et al., 2017).

Todaro dan Smith menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan partisipasi masyarakat (Meyer et al., 2017). Korten (1987) menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan desa (Korten, 1987). Dalam konteks Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian dari kewenangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan kebijakan dan pendanaan pemerintah (Nurcholis, 2011).

Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan proses yang menyeluruh dan tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan desa mencakup perubahan struktur sosial, peningkatan kualitas hidup, perluasan akses layanan dasar, serta penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembangunan desa menjadi kewenangan desa yang didukung oleh kebijakan dan pendanaan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), suatu kebijakan dapat terlaksana secara efektif dari sisi implementasi, namun belum tentu menghasilkan dampak yang kuat karena keterbatasan perencanaan atau faktor kondisi lainnya. Meskipun demikian, kinerja program tetap dapat dinilai berhasil apabila menunjukkan luaran yang positif. Pandangan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Van Meter dan Van Horn dalam merumuskan model implementasi kebijakan yang menekankan pada besarnya perubahan yang dihasilkan serta tingkat komitmen para pelaksana dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kebijakan (Anirwan, 2025). Van Meter dan Van Horn (1975) juga menyatakan bahwa implementasi tidak hanya sekadar melaksanakan perintah, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang saling memengaruhi untuk menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan (Leisa Sangga Dwi Kartika, 2024). Model implementasi ini terdiri dari enam variabel utama yang saling berkaitan, yaitu:

a) **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kebijakan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh para pelaksana di semua level. Ketidakjelasan dalam formulasi tujuan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di Tingkat pelaksana, sehingga pelaksanaan tidak terarah.

b) **Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang mendukung, seperti sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas, serta sarana dan prasarana.

c) **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana harus memiliki struktur, prosedur kerja (SOP), dan sistem koordinasi yang efektif agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Karakteristik organisasi juga dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, kepemimpinan lokal, dan tingkat fragmentasi dalam pengambilan keputusan.

d) **Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Komunikasi yang terbuka dan konsisten antara berbagai instansi atau unit pelaksana merupakan prasyarat penting dalam menjaga keselarasan kebijakan.

e) **Sikap Para Pelaksana**

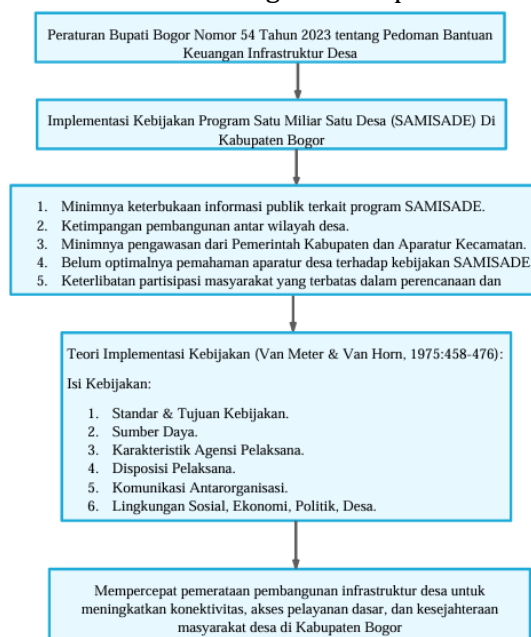
Sikap para pelaksana terhadap kebijakan akan menentukan seberapa besar mereka bersedia menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Jika kebijakan dinilai tidak relevan atau tidak menguntungkan, maka resistensi atau penolakan dapat terjadi. Oleh karena itu, perlu dibangun komitmen bersama dalam implementasi kebijakan.

f) **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Faktor eksternal seperti kondisi sosial budaya masyarakat, tingkat pendidikan, ekonomi lokal, serta dinamika politik juga turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Implementasi di daerah yang minim infrastruktur atau rendah partisipasi masyarakat akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

## Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Olahan Penulis, 2025

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Program SAMISADE berdasarkan klasterisasi desa. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara sistematis sesuai kondisi nyata di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh informasi secara komprehensif dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan dalam implementasi kebijakan, meliputi:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
2. Aparatur Kecamatan.
3. Kepala Desa.
4. Perangkat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
6. Perwakilan Masyarakat Desa.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Program Satu Miliar Satu Desa atau SAMISADE di Kabupaten Bogor pada tiga desa yaitu Desa Sasak Panjang, Desa Cibentang, dan Desa Cogreg. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik.

### Standar dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan Program SAMISADE telah diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023 yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur desa dan pemerataan pembangunan wilayah. Namun pemahaman terhadap tujuan kebijakan masih berbeda antar desa.

Di Desa Sasak Panjang, tujuan program dipahami sebagai kebijakan pemerataan pembangunan desa dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Aparatur desa juga memahami pentingnya pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya di Desa Cibentang, pemahaman aparaturnya terhadap kebijakan masih terbatas. Program lebih dipahami sebagai bantuan pembangunan fisik dibandingkan sebagai kebijakan pembangunan strategis jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan pengendalian mutu pembangunan belum optimal dan masih ditemukan kerusakan pada hasil pembangunan. Selain itu, masyarakat dan BPD juga belum memahami tujuan kebijakan secara menyeluruh sehingga fungsi pengawasan belum maksimal.

Di Desa Cogreg, pemahaman terhadap kebijakan juga belum merata. Aparatur desa memahami program sebagai bantuan pembangunan, namun implementasi belum sepenuhnya memperhatikan standar teknis dan keberlanjutan pembangunan. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan variasi kualitas pelaksanaan program antar desa.

### **Sumber Daya**

Dari aspek sumber daya, seluruh desa memperoleh dukungan dana yang sama yaitu bantuan keuangan sebesar satu miliar rupiah. Namun keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh dana, melainkan juga kapasitas sumber daya manusia.

Desa Sasak Panjang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang relatif lebih baik sehingga mampu mengelola program dengan lebih efektif. Aparatur desa mampu menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, dan melakukan pengawasan secara lebih terstruktur.

Sebaliknya di Desa Cibentang dan Desa Cogreg, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam implementasi program. Aparatur desa masih membutuhkan pendampingan dalam perencanaan, administrasi, dan pelaporan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan SAMISADE.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya perbedaan antar desa dalam menjalankan program. Struktur organisasi pelaksana secara formal telah terbentuk pada seluruh desa, namun fungsi koordinasi dan pembagian peran berjalan berbeda.

Di Desa Sasak Panjang, struktur organisasi pelaksana berjalan relatif baik. Pembagian tugas jelas dan koordinasi antar perangkat desa berlangsung efektif. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara rutin sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Di Desa Cibentang, koordinasi antar perangkat desa berjalan cukup baik namun belum optimal. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan administrasi dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Sedangkan di Desa Cogreg, koordinasi dan pembagian tugas belum berjalan secara maksimal sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi antar organisasi pelaksana menunjukkan variasi antar desa. Di Desa Sasak Panjang, komunikasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan DPMD berlangsung aktif dan rutin melalui rapat koordinasi dan monitoring lapangan. Komunikasi yang terbuka memudahkan penyelesaian kendala teknis dan administratif.

Di Desa Cibentang, komunikasi telah berjalan melalui rapat mingguan dan koordinasi formal. Namun sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara merata sehingga masih terdapat kesenjangan informasi. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami Program SAMISADE secara menyeluruh.

Di Desa Cogreg, komunikasi cenderung bersifat administratif dan reaktif. Minimnya komunikasi dua arah menyebabkan informasi kebijakan tidak tersampaikan secara utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan program.

### **Disposisi atau Pelaksana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya pada umumnya memiliki komitmen yang baik dalam pelaksanaan program. Di Desa Sasak Panjang, aparaturnya menjalankan program dengan tanggung jawab tinggi serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat turut berpartisipasi melalui gotong royong dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Di Desa Cibentang dan Desa Cogreg, komitmen aparaturnya juga cukup baik, namun keterlibatan masyarakat masih terbatas. Partisipasi masyarakat lebih bersifat sebagai penerima manfaat dibandingkan sebagai pengawas pelaksanaan program.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan sosial ekonomi dan politik juga memengaruhi implementasi kebijakan. Di Desa Sasak Panjang, kondisi sosial masyarakat sangat mendukung pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat tinggi melalui gotong royong dan swadaya dalam pembangunan infrastruktur. Dukungan masyarakat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kualitas pembangunan.

Di Desa Cibentang, kondisi sosial masyarakat cukup kondusif dan mendukung pelaksanaan program. Masyarakat merasakan manfaat pembangunan jalan yang memperlancar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Namun partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan masih terbatas.

Di Desa Cogreg, partisipasi masyarakat tergolong cukup namun belum berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat cenderung hanya pada tahap perencanaan dan belum optimal dalam pengawasan kegiatan pembangunan.

### **Klaster Implementasi Kebijakan**

Hasil klasterisasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat implementasi Program SAMISADE pada tiga desa penelitian. Pengelompokan dilakukan berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Klasterisasi dilakukan dengan melihat konsistensi pemenuhan indikator, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta capaian hasil pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Program SAMISADE berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tiga kategori klaster kluster optimal, belum optimal dan sangat optimal.

Klaster optimal terdiri dari Desa Sasak Panjang dan Desa Cibentang. Kedua desa menunjukkan pemenuhan indikator implementasi yang relatif baik. Aparatur desa memahami tujuan kebijakan, sumber daya keuangan tersedia, koordinasi dengan kecamatan dan DPMD berjalan, serta komunikasi antarorganisasi cukup efektif. Partisipasi masyarakat juga mulai terlihat dalam kegiatan pembangunan. Namun masih terdapat kendala pada kapasitas teknis aparatur dan kualitas pengawasan sehingga belum mencapai kategori sangat optimal.

Klaster belum optimal ditempati oleh Desa Cogreg. Desa ini menunjukkan kelemahan pada pemahaman kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi yang belum efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan administrasi dan kualitas pembangunan yang belum maksimal.

Hasil klasterisasi juga menunjukkan bahwa tidak terdapat desa yang masuk dalam kategori sangat optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Program SAMISADE masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan merata.

### **Pembahasan**

#### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan tujuan kebijakan Program SAMISADE telah dirumuskan secara jelas melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan desa di Kabupaten Bogor. Program ini memberikan bantuan keuangan sebesar satu miliar rupiah kepada setiap desa setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.

Namun berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan SAMISADE. Sebagian aparatur desa lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan fisik dan pemenuhan administrasi dibandingkan dengan tujuan pemerataan pembangunan jangka panjang. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan berbeda antar desa serta memengaruhi kualitas hasil pembangunan.

Di Desa Sasak Panjang, tujuan kebijakan dipahami dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat. Di Desa Cibentang, pemahaman kebijakan mulai berkembang namun masih terdapat keterbatasan dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu, di Desa Cogreg pemahaman kebijakan masih terbatas sehingga pelaksanaan pembangunan belum optimal dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan desa.

Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga oleh tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan Program SAMISADE. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya keuangan dinilai cukup karena setiap desa memperoleh bantuan sebesar satu miliar rupiah. Namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program.

Keterbatasan sumber daya manusia terlihat pada kurangnya tenaga teknis di tingkat kecamatan dan desa. Aparatur kecamatan tidak memiliki tenaga teknis khusus untuk melakukan pengawasan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, pengawasan teknis dilakukan dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis PUPR dan pendamping desa.

Di Desa Cogreg, keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari kurangnya kemampuan teknis dalam menyusun RAB, memastikan spesifikasi material, serta melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan. Selain itu, keterbatasan kemampuan administratif juga memengaruhi penyusunan dokumen dan pelaporan kegiatan. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas hasil pembangunan yang belum optimal.

Sementara itu, Desa Sasak Panjang dan Desa Cibentang menunjukkan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik. Aparatur desa mampu menjalankan fungsi administratif dan pelaksanaan pembangunan secara lebih efektif, meskipun masih membutuhkan pendampingan dari kecamatan dan instansi teknis.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dalam mengelola kebijakan.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Struktur organisasi pelaksana Program SAMISADE telah terbentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pemerintah Kabupaten Bogor berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia anggaran, DPMD sebagai koordinator dan pengawas program, kecamatan sebagai fasilitator dan pengawas, serta pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Namun berdasarkan hasil penelitian, organisasi pelaksana belum berjalan secara efektif. Koordinasi antar organisasi masih belum optimal dan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya kerusakan infrastruktur meskipun pembangunan telah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas teknis dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas.

Desa Sasak Panjang menunjukkan organisasi pelaksana yang lebih efektif dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang aktif. Desa Cibentang menunjukkan koordinasi yang cukup baik namun masih membutuhkan peningkatan dalam pengawasan teknis. Sedangkan Desa Cogreg menunjukkan organisasi pelaksana yang belum optimal sehingga memengaruhi kualitas implementasi kebijakan.

### **Komunikasi Antarorganisasi**

Komunikasi antarorganisasi dalam pelaksanaan Program SAMISADE telah dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, pertemuan daring, dan media komunikasi digital seperti WhatsApp. Komunikasi ini bertujuan menyampaikan arahan kebijakan serta menindaklanjuti permasalahan di lapangan.

Meskipun komunikasi berjalan cukup aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya menjamin keseragaman pemahaman kebijakan. Masih terdapat perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat kecamatan dan desa sehingga memengaruhi implementasi kebijakan.

Selain itu, komunikasi kepada masyarakat juga belum berjalan secara merata. Sosialisasi kebijakan masih terbatas sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan dengan komunikasi kebijakan yang berkelanjutan.

### **Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SAMISADE belum sepenuhnya didukung

oleh komitmen pelaksana yang kuat. Sebagian aparatur desa masih kurang inisiatif sehingga pelaksanaan program belum berjalan maksimal.

Di Desa Sasak Panjang, aparatur desa menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program. Aparatur desa aktif melibatkan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan.

Di Desa Cibentang, komitmen aparatur desa cukup baik namun masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan teknis. Sementara itu, di Desa Cogreg komitmen pelaksana belum optimal sehingga pelaksanaan program berjalan kurang maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

### **Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Sosial**

Kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik juga memengaruhi implementasi kebijakan Program SAMISADE. Desa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan implementasi kebijakan yang lebih optimal.

Pembangunan infrastruktur melalui Program SAMISADE memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas ekonomi warga. Perbaikan jalan meningkatkan aksesibilitas dan membuka peluang usaha masyarakat. Selain itu, keberhasilan pembangunan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Namun partisipasi masyarakat belum merata di semua desa. Sebagian masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat dan belum terlibat aktif dalam pengawasan pembangunan. Selain itu, dinamika politik desa juga berpotensi memengaruhi pelaksanaan program meskipun tidak menjadi hambatan utama.

Perbedaan kondisi sosial ekonomi dan politik antar desa menyebabkan variasi tingkat implementasi kebijakan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor. Desa dengan dukungan masyarakat yang lebih kuat menunjukkan hasil pembangunan yang lebih optimal dibandingkan desa dengan partisipasi masyarakat yang rendah.

### **Klasterisasi Implementasi Kebijakan Program SAMISADE**

Hasil klasterisasi menunjukkan adanya variasi tingkat implementasi Program SAMISADE pada tiga desa penelitian yaitu Desa Sasak Panjang, Desa Cibentang, dan Desa Cogreg. Pengelompokan dilakukan berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi dan politik.

Desa Sasak Panjang dan Desa Cibentang termasuk dalam klaster optimal. Kedua desa menunjukkan bahwa sebagian besar indikator implementasi kebijakan telah terpenuhi secara konsisten. Aparatur desa memiliki pemahaman yang relatif baik terhadap tujuan Program SAMISADE, ketersediaan sumber daya keuangan cukup memadai, serta struktur organisasi pelaksana telah berjalan. Koordinasi antarorganisasi juga berlangsung cukup efektif melalui pendampingan kecamatan dan DPMD, meskipun belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan, namun keterbatasan kapasitas teknis dan pengawasan mutu pembangunan masih menjadi kendala untuk mencapai tingkat implementasi sangat optimal.

Sementara itu, Desa Cogreg termasuk dalam klaster belum optimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi yang cenderung reaktif, serta rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan administrasi serta kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum optimal.

Secara keseluruhan, hasil klasterisasi menunjukkan bahwa implementasi Program SAMISADE di Kabupaten Bogor masih didominasi oleh klaster optimal dan belum optimal. Tidak ditemukannya desa pada klaster sangat optimal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas pengawasan, serta penguatan komunikasi dan partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal dan merata.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor dapat disimpulkan bahwa:

### Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan SAMISADE telah dirumuskan secara jelas melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2023. Namun, pelaksanaan Program SAMISADE belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan. Hal ini karena pemahaman aparatur desa masih berbeda-beda dan cenderung berfokus pada pelaksanaan fisik serta pemenuhan administrasi, sehingga tujuan pemerataan pembangunan desa belum tercapai secara optimal.

### Sumber Daya

Secara umum, sumber daya keuangan Program SAMISADE sudah mencukupi, namun keterbatasan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan dan memengaruhi kualitas hasil pembangunan desa.

### Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan Program SAMISADE belum didukung oleh organisasi pelaksana yang berjalan secara efektif. Struktur pelaksana sudah terbentuk, namun koordinasi dan fungsi pengawasan belum berjalan optimal.

### Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana

Pelaksanaan Program SAMISADE belum sepenuhnya didukung oleh komunikasi yang konsisten antarorganisasi. Koordinasi sudah dilakukan, tetapi masih terdapat perbedaan pemahaman kebijakan di tingkat pelaksana.

### Disposisi atau Sikap Pelaksana

Pelaksanaan Program SAMISADE belum sepenuhnya didukung oleh sikap dan komitmen pelaksana yang kuat. Sebagian aparatur desa masih kurang inisiatif sehingga pelaksanaan program belum berjalan maksimal.

### Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan politik antar desa memengaruhi pelaksanaan Program SAMISADE. Desa dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik dan dukungan kebijakan yang stabil mampu melaksanakan program secara lebih optimal, sedangkan desa dengan keterbatasan kondisi tersebut menunjukkan hasil pembangunan yang belum merata.

## E. Referensi

- Agus Sopyan. (2025). *Program samisade hanya ada di Kabupaten Bogor, Desa diberi kewenangan mengelola sendiri anggaran Rp 1 Miliar*. Desk Jabar. <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1138935190/program-samisade-hanya-ada-di-kabupaten-bogor-desa-diberi-kewenangan-mengelola-sendiri-anggaran-rp-1-miliar>
- Agustina, T. A., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2022). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten Tuban. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 238–250.
- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22–35. <https://doi.org/10.36087/jrp.v2i1.45>
- Anirwan. (2025). *Konsep Teori Administrasi Publik Dan Implementasi Kebijakan*. Deepublish Digital.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Hadi, K. (2025). Korupsi Dana Desa dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 157–169.
- Irfani et al. (2023). *Gara-gara Ulah Kades, Enam Desa di Kabupaten Bogor Tak Dapat Uang Samisade, Ini Kata DPMD*. TribunnewsBogor.Com. <https://bogor.tribunnews.com/2023/11/07/gara-gara-ulah-kades-enam-desa-di-kabupaten-bogor-tak-dapat-uang-samisade-ini-kata-dpmd>
- Jumria Mansur. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(Ii), 6.
- Kalila, et. al. (2024). Dinamika Relasi Aktor dalam Mendorong Pembangunan Desa Melalui Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 5(1), 106–117. <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i1.39677>

- Korten, D. C. (1987). *Third Generation NGO Strategies : A Key to People-centered Development*. 15, 145–159.
- Leisa Sangga Dwi Kartika, N. M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Journal of Politic and Government Studies*, Table 10, 4–6.
- Lestari, I., Isma, A., & Fufita, N. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Meyer, D. F., Masehla, T. M., & Kot, S. (2017). The relationship between economic growth and economic development: A regional assessment in South Africa. *J. Advanced Res. L. & Econ.*, 8, 1377.
- Michel, D., Mutiarin, D., Binti, H., & Manaf, A. (2024). Evaluation of the Samisade (Satu Miliar Satu Desa) Program in Bogor Regency. *International Journal of Social Science and Business*, 8(1), 93–104. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v8i1.68125>
- Munawarah dan Wahyu. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Absensi Online E-Office Di Bidang Pemadam Kebakaran Pada Kantor Satpol Pp Dan Damkar Kabupaten Tabalong. *Japb*, 6.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Purwawangsa, H., Nurrochmat, D. R., & Kartodihardjo, H. (2022). *Assessing Integration of Science in Policy-Making Process of the Utilization of Abandoned Lands in Indonesia : Case of Bogor Regency*. 6(November), 639–658.
- Ramadan, F. et al. (2023). *Implementation Of Public Service Policies at The Department of Investment And Integrated One Door Service at Pringsewu Regency*. 2(2), 173–188.
- Sally dan Edy. (2025). *Management of SamiSade in Village Infrastructure Development in Bogor Regency*. 383–394. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i16.19194>
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Publik* (Pertama). Deepublish.
- Zainal, S. (2023). *Kebijakan Publik* (M. Masykur (ed.); 2nd ed.). Salemba Humanika.